

Implementation of Facilities and Infrastructure Standards in Supporting the Learning Process at MTs Al-Fathimiyah

Fairuz Sausan Kamil^{1*}, Arya Wiradarma Saputra², Azzahra Arrohma³, Fitria Nursani Rofifah Supriyadi⁴, Hinggil Permana⁵

¹²³⁴⁵Universitas Singaperbangsa Karawang

<p>Article History: Received: 26/10/2025 Revised: 7/11/2025 Accepted: 5/12/2025 Published: 30/12/2025</p> <p>Keywords: Digital learning, educational facilities, inclusivity, infrastructure, learning process</p> <p>Kata Kunci: Pembelajaran digital, sarana pendidikan, inklusivitas, infrastruktur, proses pembelajaran</p> <p>Correspondence Address: 2310631110094@stud.ent.unsika.ac.id</p>	<p>Abstract: <i>This study looks into how standards for facilities and infrastructure are used to help learning at MTs Al Fathimiyah. The basis for this research is the important part that good educational facilities play in creating a positive learning atmosphere, boosting student enthusiasm, and supporting teachers in teaching well. The aim of this research is to examine the state, use, and difficulties of the school's facilities, along with the methods used to tackle the current issues. The study uses a descriptive qualitative approach, gathering detailed information through direct observations and interviews with the school staff. The results show that MTs Al Fathimiyah has effectively offered adequate facilities like classrooms, labs, libraries, and digital resources such as projectors, smart TVs, and computers, which greatly aid teaching and learning. Nonetheless, there are still challenges, especially in obtaining textbooks when the curriculum changes and the absence of facilities for students with special needs. To address these issues, the school employs inventive strategies, which include enhancing teacher creativity, partnering with outside organizations, and making use of BOS funds. The outcomes of this research emphasize the need for ongoing facility development, inclusive education, and updating to meet digital learning requirements. Additionally, cooperation among schools, the government, and outside partners is essential to improve infrastructure and ensure the ongoing delivery of quality education.</i></p>
--	--

Abstrak

Studi ini melihat bagaimana standar sarana dan prasarana digunakan untuk membantu belajar di MTs Al Fathimiyah. Dasar penelitian ini adalah peran penting yang dimainkan oleh fasilitas pendidikan yang baik dalam menciptakan suasana belajar yang positif, meningkatkan semangat siswa, dan mendukung guru dalam mengajar dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji keadaan, penggunaan, dan kesulitan fasilitas sekolah, beserta metode yang digunakan untuk mengatasi masalah saat ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, mengumpulkan informasi terperinci melalui observasi langsung dan wawancara dengan staf sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MTs Al Fathimiyah telah secara efektif menawarkan fasilitas yang memadai seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan sumber daya digital seperti proyektor, smart TV, dan komputer, yang sangat membantu pengajaran dan pembelajaran. Meskipun demikian, masih ada tantangan, terutama dalam mendapatkan buku ajar ketika kurikulum berubah dan tidak adanya fasilitas bagi siswa berkebutuhan khusus. Untuk mengatasi masalah ini, sekolah menggunakan strategi inventif, yang mencakup meningkatkan kreativitas guru, bermitra dengan organisasi luar, dan memanfaatkan dana BOS. Hasil penelitian ini menekankan perlunya pengembangan fasilitas yang berkelanjutan, pendidikan inklusif, dan pembaruan untuk memenuhi persyaratan pembelajaran digital. Selain itu, kerja sama antara sekolah, pemerintah, dan mitra luar sangat penting untuk meningkatkan infrastruktur dan memastikan penyampaian pendidikan berkualitas yang berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Pendidikan memainkan peran krusial dalam membentuk generasi unggul, tidak hanya secara akademis tetapi juga karakter dan keterampilan hidup sehari-hari. Salah satu komponen kunci yang memengaruhi efektivitas pendidikan adalah ketersediaan fasilitas sekolah yang memadai. Sarana dan prasarana pendidikan sangat penting, karena kegagalan dalam memprioritaskannya dapat menurunkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah menetapkan Standar Nasional Pendidikan sebagai pedoman dasar untuk mencapai kesetaraan mutu di seluruh lembaga pendidikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Yudi (2012), dan didukung oleh Megawati dan Rochman (2019), infrastruktur pendidikan merupakan faktor krusial yang mendorong peningkatan mutu pendidikan dan mendorong perkembangan optimal siswa (Megawati & Rochman, 2019). Fasilitas pendidikan yang baik tidak hanya praktis tetapi juga mampu menciptakan lingkungan belajar yang suportif, meningkatkan antusiasme siswa, dan memfasilitasi guru dalam menyampaikan materi secara lebih efektif. Hakim dan Fikriyah (2021) menjelaskan bahwa sarana dan prasarana merupakan indikator kunci untuk menilai mutu pendidikan, karena tanpa fasilitas yang memadai, proses belajar mengajar akan sulit mencapai hasil yang diinginkan (Hakim & Fikriyah, 2021).

Standar Nasional Pendidikan (SNP) berfungsi sebagai acuan utama dalam penyelenggaraan pendidikan, yang mencakup berbagai dimensi seperti standar isi, proses, kelulusan, tenaga pendidik, sarana prasarana, manajemen, pembiayaan, dan penilaian. Pada hakikatnya, standar-standar ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap lembaga pendidikan mampu memberikan layanan yang optimal, sehingga semua lembaga diwajibkan untuk mematuhi kedelapan standar tersebut. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab XII, Pasal 45, Ayat 1, yang mewajibkan setiap jenis pendidikan formal dan nonformal untuk menyediakan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, termasuk aspek fisik, intelektual, sosial, emosional, dan psikologis (Megawati & Rochman, 2019). Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk mengatasi berbagai kendala terkait fasilitas melalui kebijakan SNP. Sarana

pendidikan sendiri tercakup dalam salah satu dari lima standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan, sebagaimana dinyatakan oleh Amrullah dkk. (2022). Standar ini secara khusus ditujukan untuk Sekolah Dasar/Madrasah Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Madrasah Ibtidaiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Madrasah Ibtidaiyah (SMA/MA). Memiliki sarana yang memenuhi standar sangat penting untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Apabila suatu sekolah dilengkapi dengan sarana yang baik dan memadai, sekolah tersebut cenderung lebih diminati oleh masyarakat (Juita et al., 2024).

Berdasarkan hasil analisis penelitian terdahulu yang membahas standar sarana dan prasarana di madrasah tsanawiyah menunjukkan bahwa banyak penelitian sebelumnya berfokus pada pemenuhan kuantitas dan kualitas sarana-prasarana fisik saja sebagai indikator utama mutu pendidikan (Juita et al., 2024; Megawati & Rochman, 2019). Pada penelitian ini berusaha memperluas kajian dengan menambahkan aspek sarana digital pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan era teknologi, sebuah area yang masih kurang dieksplorasi secara mendalam di kajian sebelumnya. Penelitian ini menjelaskan adanya kekurangan dalam penyediaan fasilitas ramah difabel, menyoroti kebutuhan untuk pengembangan pendidikan inklusif (Rahayu, 2024). Penelitian terdahulu jarang membahas aspek inklusif secara spesifik pada konteks MTs, sehingga hal ini menjadi gap penting yang dihimpun dan dibuka dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini juga ditemukan isu keterlambatan pengadaan buku paket akibat pergantian kurikulum sebagai kendala pembelajaran. Isu ini relatif jarang dikaji secara spesifik dalam penelitian terdahulu terkait sarana dan prasarana pendidikan di madrasah atau SMP, menjadi kontribusi baru yang memberikan gambaran dinamika implementasi kurikulum di lapangan (Sari & Asmarani, 2023). Selain itu, penelitian ini menyoroti bagaimana kreativitas guru dalam mengelola sarana dan prasarana menjadi strategi utama yang belum banyak

dibahas secara rinci sebelumnya, khususnya terkait pemanfaatan dana BOS dan kolaborasi eksternal (Rachman et al., 2022; Yusuf & Wulandari, 2022).

Penelitian ini dirancang untuk mengevaluasi ketersediaan sarana dan prasarana di MTs Al-Fathimiyah terhadap pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan di sekolah, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah. Berdasarkan Permendiknas No. 24/2007, indikator pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1), yang menyatakan: "Indikator pemenuhan standar sarana dan prasarana adalah sebagai berikut: a. ketersediaan; b. kelayakan; c. kecukupan; d. kesesuaian; e. keterjangkauan; dan f. keselamatan." (*Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Dan Sekolah Men., 2007*). Dalam pelaksanaannya penulis melakukan pengumpulan data lapangan melalui observasi dan wawancara terhadap guru kurikulum MTs Al-Fathimiyah untuk mengukur indikator pemenuhan standar, kemudian menganalisis kesenjangan antara kondisi aktual dengan standar nasional.

Penulis tertarik melakukan observasi dan wawancara dengan guru kurikulum di MTs Al-Fathimiyah, yang terletak di Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Madrasah ini dipilih karena memberikan gambaran konkret tentang bagaimana metode pendidikan modern dapat dipadukan dengan pendekatan tradisional. Melalui kegiatan ini, penulis dapat mengamati secara langsung bagaimana fasilitas yang ada mendukung proses belajar mengajar, serta bagaimana rutinitas sehari-hari siswa dijalankan sesuai kurikulum yang memadukan nilai-nilai agama dengan ilmu pengetahuan kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memperoleh data lapangan yang mendalam tentang efektivitas metode pendidikan dan manajemen infrastruktur dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sana. Berdasarkan observasi yang

dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2025 di MTs Al-Fathimiyah, terlihat bahwa sekolah telah berupaya keras untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai dan berkualitas tinggi. Fasilitas yang tersedia meliputi meja dan kursi ergonomis, proyektor, TV pintar, komputer, sistem CCTV di setiap kelas, laboratorium komputer, laboratorium umum, dan perpustakaan. Semua ini merupakan sumber daya berharga yang mendukung pembelajaran berbasis teknologi dan informasi. Temuan ini sejalan dengan pendapat Susanto (2022) yang menekankan bahwa pemanfaatan fasilitas teknologi di sekolah dapat meningkatkan kualitas interaksi selama proses pembelajaran, memperluas akses ke berbagai sumber pengetahuan, dan memungkinkan siswa memahami materi lebih cepat (Susanto, 2022).

Namun, wawancara dengan pihak sekolah mengungkapkan beberapa tantangan yang berkelanjutan, terutama terkait keterlambatan pengadaan buku teks akibat perubahan kurikulum. Hal ini seringkali menyebabkan keterlambatan dalam pendistribusian materi kepada siswa, yang pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas pembelajaran, mengingat buku teks merupakan salah satu bahan ajar utama di sekolah. Sari dan Asmarani (2023) juga menyoroti bahwa permasalahan tersebut umum terjadi di sekolah, terutama ketika kurikulum berubah, sehingga membutuhkan fleksibilitas yang lebih besar dalam mencari solusi alternatif (Sari & Asmarani, 2023).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi sejauh mana standar sarana dan prasarana terpenuhi di MTs Al-Fathimiyah, sekaligus mengkaji kendala yang dihadapi dan strategi yang diterapkan sekolah untuk mengatasinya. Analisis ini memberikan gambaran menyeluruh tentang fasilitas sekolah, menyoroti kekuatan dan tantangannya. Informasi ini krusial untuk memahami upaya sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang suportif, meskipun terdapat berbagai keterbatasan. Lebih lanjut, temuan ini dapat menjadi dasar refleksi untuk perbaikan fasilitas di masa mendatang, guna memastikan peningkatan kualitas pendidikan sekolah yang berkelanjutan. Dengan demikian, MTs Al-Fathimiyah dapat menjadi contoh nyata

komitmen sekolah dalam mewujudkan pendidikan bermutu, meski di tengah berbagai kendala sarana dan prasarana.

METODE

Penelitian ini mengadopsi metodologi deskriptif kualitatif guna menggali pemahaman komprehensif terkait penerapan standar fasilitas dan infrastruktur dalam rangkaian proses edukasi di MTs Al Fathimiyah. Pemilihan metodologi kualitatif didasarkan pada kapasitasnya untuk memfasilitasi pemahaman fenomena dalam lansekap alaminya, melalui dialog langsung dengan para pemampu kepentingan dan observasi situasi yang menjadi fokus studi (Creswell & Creswell, 2017). Area investigasi penelitian ini terpusat di MTs Al Fathimiyah, yang berlokasi di Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang. Fokus subjek penelitian diarahkan pada Ibu Yuliyanti, seorang pendidik yang memegang peran krusial dalam administrasi kurikulum institusional. Pemilihan beliau didasarkan pada kriteria purposive sampling, mengingat kapasitasnya sebagai individu yang paling memiliki pemahaman mendalam mengenai optimalisasi sumber daya fasilitas dan infrastruktur dalam aktivitas pedagogis.

Akuisisi data dilaksanakan melalui pengamatan partisipatif, diskusi terstruktur, dan analisis arsip. Observasi dikerjakan guna memahami dimensi spasial fasilitas serta bagaimana pemanfaatannya dalam kegiatan pedagogis, yang kemudian dikodifikasikan ke dalam jurnal observasi. Diskusi semi-terstruktur dengan Ibu Yuliyanti terentang selama lebih kurang 5-10 menit, diabadikan melalui perangkat audio, dan selanjutnya ditranskripsi verbatim demi keperluan evaluasi. Arsip visual mencakup potret-potret sarana edukatif dan kegiatan didaktik dimanfaatkan sebagai validasi empiris dalam konstruksi narasi penelitian. Sinergi ketiga metodologi ini memfasilitasi investigator dalam mengartikulasi data yang lebih holistik dan kaya.

Data yang diperoleh menjalani analisis kuantitatif menggunakan kerangka kerja analisis Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang mengintegrasikan tahapan reduksi data, visualisasi data, dan verifikasi kesimpulan (Ridder, 2014).

Untuk memelihara integritas data, metodologi trustworthiness sebagaimana diartikulasikan oleh Lincoln dan Guba (1985) diimplementasikan, melibatkan peningkatan kredibilitas melalui triangulasi metodologis dan validasi partisipan, perluasan transferabilitas melalui penyusunan narasi kontekstual yang komprehensif, penguatan dependabilitas melalui dokumentasi kronologis yang cermat terhadap prosedur riset, dan penegasan konfirmabilitas melalui penelusuran empiris yang teliti terhadap catatan lapangan dan arsip pendukung. Implikasi dari pendekatan ini adalah untuk memastikan bahwa temuan riset menghasilkan tingkat keandalan dan kapabilitas ilmiah yang dapat diverifikasi (Lincoln, 1985).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana pendidikan mengacu pada semua fasilitas yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar, baik portabel maupun tetap, untuk memastikan tujuan pendidikan tercapai dengan baik, tertib, efektif, dan efisien. Menurut Arikunto dan Yuliana (2012), fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat membantu dan mendukung kegiatan pembelajaran, biasanya berupa barang. Dana juga dapat dikategorikan sebagai bagian dari sumber daya pendidikan. Menurut E. Mulyasa (2004), sumber daya pendidikan mencakup berbagai peralatan dan perlengkapan yang digunakan langsung untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, seperti papan tulis, spidol, penghapus, meja, dan kursi. Peralatan ini digunakan oleh guru dan siswa untuk memfasilitasi proses pembelajaran

Secara etimologis, prasarana didefinisikan sebagai alat yang tidak digunakan secara langsung untuk mencapai suatu tujuan. Dalam pendidikan, contohnya meliputi lokasi sekolah, gedung, lapangan olahraga, dan pendanaan. Di sisi lain, fasilitas merujuk pada alat yang digunakan secara langsung, seperti ruang kelas, buku, perpustakaan, dan laboratorium (Mulyasa, 2004: 40). Prasarana sendiri mencakup fasilitas yang secara tidak langsung mendukung pendidikan, seperti taman sekolah, jalur akses ke sekolah, dan peraturan yang berlaku. Kedua unsur ini, yaitu sarana dan prasarana, berperan krusial dalam menjamin

kelancaran penyelenggaraan pendidikan. Meskipun tidak semua sarana harus tersedia secara penuh, penyediaan sarana dan prasarana tetap diperlukan agar kegiatan pendidikan dapat berjalan dengan lancar (Sutisna & Effane, 2022).

Perbedaan utama antara sarana pendidikan dan prasarana pendidikan terletak pada fungsinya masing-masing. Sarana pendidikan dirancang untuk memfasilitasi proses belajar mengajar itu sendiri, sementara prasarana pendidikan lebih ditujukan untuk memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan. Di sini, konsep "pemanfaatan langsung" dan "tidak langsung" sangat penting. Pemanfaatan "langsung" berkaitan dengan penyampaian materi, seperti ketika guru menggunakan papan tulis untuk menulis isi pelajaran. Sebaliknya, meja yang digunakan siswa tidak secara langsung untuk menulis pelajaran, melainkan sebagai tempat mencatat dari buku catatan, sehingga buku catatan termasuk sebagai alat yang digunakan secara langsung (Fauzi, 2020).

Standar sarana dan prasarana memegang peranan penting dalam mendukung kualitas pembelajaran. Ibu Yuliyanti mengungkapkan bahwa standar yang baik memastikan bahwa semua kebutuhan siswa terpenuhi sesuai dengan kadar jumlahnya, seperti meja, kursi, dan perlengkapan kelas lainnya sesuai jumlah siswa.

“Standar yang diperlukan untuk sarana dan prasarana memenuhi semua kebutuhan anak. Sejumlah siswa sama misalkan meja, kursi dan kebutuhan perkelasnya itu sudah memenuhi” (wawancara dengan guru kurikulum, Ibu Yuliyanti, pada tanggal 26 Agustus 2025).

Tujuan utama penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendidikan adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan nyaman agar proses belajar-mengajar dapat berjalan sebaik mungkin. Dengan memastikan fasilitas tersebut memenuhi standar, siswa akan mendapatkan dukungan yang cukup untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan belajar-mengajar secara efektif. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 45 Ayat (1), yang mewajibkan setiap lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal untuk menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan dan mendukung

perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan mental siswa (Juita et al., 2024).

Ketika fasilitas pendidikan tersedia dengan baik, hal ini dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan menjalani proses pendidikan. Sebaliknya, jika alat belajar tidak memadai, hal ini justru dapat menghambat aktivitas belajar mereka. Meraih nilai bagus di sekolah tentu menjadi kebanggaan bagi siswa, baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi keluarga dan orang-orang terdekat yang mendukung mereka. Sayangnya, masih banyak siswa yang motivasi belajarnya tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan di kalangan siswa ini bahkan dapat menjadi ancaman serius bagi generasi mendatang (Zohriah, 2015, dalam Juita et al., 2024). Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007,

1. Standar sarana dan prasarana sekolah mencakup dua aspek utama. Pertama, standar sarana, yang meliputi peralatan, perangkat pendidikan, media pendidikan, literatur, bahan ajar lainnya, serta teknologi informasi dan komunikasi, termasuk peralatan tambahan yang wajib tersedia di setiap sekolah atau madrasah.
2. Standar prasarana, yang meliputi lahan, gedung, ruangan, dan instalasi tenaga listrik serta layanan yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah atau madrasah. Artikel ini berfokus pada standar sarana dan prasarana untuk jenjang pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs). Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 4 Tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau MTs sekurang-kurangnya harus memiliki prasarana sebagai berikut:
 - 1) Ruang kelas,
 - 2) Perpustakaan
 - 3) Laboratorium IPA,
 - 4) Ruang pimpinan,
 - 5) Ruang guru,
 - 6) Ruang tata usaha,

- 7) Tempat ibadah,
- 8) Ruang konseling,
- 9) Ruang Kesehatan dan Keselamatan Kerja,
- 10) Ruang organisasi siswa,
- 11) Toilet,
- 12) Gudang,
- 13) Ruang sirkulasi,
- 14) Taman bermain atau lapangan olahraga.

Implementasi Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Efektivitas Pembelajaran di MTs Al-Fathimiyah

Wawancara mengungkapkan perbedaan yang mencolok dalam penyediaan sumber belajar di sekolah ini. Di satu sisi, sekolah telah membuat kemajuan signifikan dalam mengintegrasikan teknologi terkini ke dalam infrastruktur kelas. Misalnya, keberadaan Smart TV, proyektor dan CCTV di setiap kelas memberikan fondasi yang kuat untuk pembelajaran di era digital saat ini. Menurut Ibu Yulianti (wawancara, 26 Agustus 2025),

“sarana dan prasarana di kelas sudah memadai, setiap kelas sudah memiliki TV pintar, infokus, dan CCTV” (wawancara dengan guru kurikulum, Ibu Yuliyanti, pada tanggal 26 Agustus 2025).

Dengan fasilitas tersebut, guru dapat menyajikan materi yang lebih hidup, menarik secara visual, dan melibatkan siswa secara aktif, sejalan dengan kebutuhan pendidikan abad ke-21. Penggunaan teknologi ini telah terbukti meningkatkan partisipasi dan antusiasme siswa secara signifikan dalam belajar, sebagaimana dibuktikan dalam penelitian Rahman (2023). Lebih lanjut, perangkat ini memungkinkan akses tak terbatas ke sumber belajar daring, pemutaran video edukasi, dan penggunaan aplikasi interaktif, sehingga menciptakan suasana kelas yang lebih dinamis (Fitrah et al., 2022).

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan Permendiknas No. 24 Tahun 2007 menjadi faktor penting dalam pencapaian mutu pendidikan. Fasilitas seperti laboratorium, perpustakaan, dan media pembelajaran

digital membantu guru dalam mencapai tujuan kurikulum secara efektif (Ariyanto, 2024; Triyono, 2019). Menurut Juita, Jahera, Zulkifli, dan Ananda (2024), sekolah yang memenuhi standar sarana dan prasarana menunjukkan peningkatan signifikan dalam motivasi dan hasil belajar siswa (Juita et al., 2024). Ibu Yulianti juga menyampaikan bahwa,

“standar yang diperlukan untuk sarana dan prasarana sudah memenuhi kebutuhan anak, seperti meja, kursi, dan perlengkapan per kelas sesuai jumlah siswa” (wawancara dengan guru kurikulum, Ibu Yuliyanti, pada tanggal 26 Agustus 2025).

Hal ini menunjukkan kesesuaian fasilitas di MTs Al-Fathimiyah dengan kriteria Standar Nasional Pendidikan yang memastikan proses belajar berjalan efektif dan nyaman bagi siswa. Triyono (2019) menjelaskan bahwa sarana meliputi alat-alat langsung seperti peralatan dan bahan ajar, sementara prasarana mencakup infrastruktur dasar seperti bangunan dan lahan. Kedua aspek ini perlu dioptimalkan agar pembelajaran bisa berjalan lancar secara berkelanjutan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, sarana dan prasarana termasuk dalam delapan standar nasional pendidikan. Ketersediaan fasilitas yang memenuhi standar ini menjadi tolok ukur utama untuk akreditasi sekolah dan keberhasilan lulusan (Juita et al., 2024)

Ketersediaan sarana-prasarana yang memadai tidak hanya memengaruhi prestasi individu siswa, tapi juga membantu meratakan mutu pendidikan di berbagai daerah. Jika fasilitas tidak merata, bisa timbul kesenjangan hasil belajar antar sekolah. Dalam hal ini, guru-guru turut aktif terlibat dalam mengidentifikasi kebutuhan sarana setiap tahun ajaran, yang menunjukkan adanya pendekatan partisipatif dalam pengelolaan fasilitas (Wulansari, 2021). Sekolah merespons dengan meminta daftar kebutuhan dari para guru, lalu menggunakannya sebagai dasar untuk mengajukan fasilitas. Ini mencerminkan model pengelolaan dari bawah ke atas (Fajartriani & Karsiwan, 2021). Contohnya, mereka mengusulkan alat bantu seperti penggaris dan jangka untuk pelajaran matematika, yang jelas-jelas praktis dan langsung mendukung kegiatan belajar. Namun, meski mekanisme ini ada, masih ada hambatan seperti anggaran terbatas, prosedur yang belum

seragam, dan kesenjangan antara apa yang dibutuhkan dengan yang benar-benar disediakan di lapangan (Wulansari, 2021)

Meskipun fasilitas di MTs Al-Fathimiyah sudah cukup baik, masih terdapat kendala dalam pengadaan buku paket akibat perubahan kurikulum. Ibu Yulianti menuturkan bahwa,

“sarananya kurang di buku paket, karena setiap ganti kurikulum buku juga ikut berganti” (wawancara dengan guru kurikulum, Ibu Yuliyanti, pada tanggal 26 Agustus 2025).

Kondisi ini menunjukkan pentingnya perencanaan anggaran dan pengelolaan sumber daya yang adaptif terhadap perubahan kurikulum. Kendala lain dari segi fasilitas dan anggaran yang tersedia di MTs Al Fathimiyah, masih terlihat bahwa sekolah tersebut belum mampu menyediakan akses yang memadai bagi siswa berkebutuhan khusus. Hal ini menunjukkan adanya hambatan bagi pengembangan fasilitas yang lebih inklusif. Lebih lanjut, ketersediaan fasilitas yang mendukung penyandang disabilitas sangat penting untuk mewujudkan pendidikan inklusif, seperti menyediakan jalur landai, toilet khusus, dan ruang belajar yang mudah diakses. Penelitian terbaru juga menegaskan bahwa ketersediaan fasilitas inklusif merupakan prasyarat bagi siswa berkebutuhan khusus untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembelajaran (Rahayu, 2024).

Dalam menghadapi keterbatasan fasilitas, sekolah melakukan beberapa strategi, seperti mengajukan proposal, memanfaatkan Dana BOS, dan meminta bantuan dari yayasan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Yuliyanti,

“Untuk menunjang sarana yang kurang, kita biasanya mengajukan proposal. Kita kan ada dana BOS juga misalnya pakai dana bos atau yayasan” (wawancara dengan guru kurikulum, Ibu Yuliyanti, pada tanggal 26 Agustus 2025).

Upaya ini sejalan dengan hasil penelitian Rachman, Hayati, dan Mariyani (2022) yang menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS secara efektif dapat meningkatkan kualitas sarana pembelajaran (Rachman et al., 2022). Menurut Fajartriani dan Karsiwan (2021), pelibatan guru dalam mengidentifikasi

kebutuhan sarana merupakan bentuk manajemen partisipatif yang membantu sekolah menentukan prioritas pengadaan (Fajartriani & Karsiwan, 2021).

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah yang pada dasarnya bertujuan untuk menyediakan dana bagi biaya operasional non-guru pada lembaga pendidikan dasar yang menyelenggarakan wajib belajar. Besarnya bantuan yang diterima sekolah bergantung pada satuan biaya yang ditetapkan. Dana BOS dikelola langsung oleh lembaga pendidikan untuk menutupi berbagai biaya operasional, sehingga tidak membebani peserta didik. Secara umum, program ini dirancang untuk meringankan beban keuangan masyarakat terkait biaya pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun. Lebih lanjut, BOS dapat dialokasikan untuk biaya personalia dan non-personalia. Biaya personalia meliputi kesejahteraan pegawai, honor guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT), uang lembur, dan pengembangan profesi guru, di antara pengeluaran lainnya. Biaya non-personalia meliputi pengeluaran untuk mendukung kegiatan belajar mengajar (KBM), penelitian dan evaluasi, pemeliharaan dan perawatan sarana, tenaga dan layanan, serta pengembangan dan supervisi peserta didik (Rachman et al., 2022). Berdasarkan pernyataan Ibu Yuliyanti, langkah-langkah tersebut sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS dan kerja sama dengan pihak eksternal dapat sangat efektif dalam meningkatkan kualitas fasilitas sekolah (Nurhidayah, 2023; Yusuf and Wulandari, 2022). Oleh karena itu, meskipun memiliki berbagai keterbatasan, kemampuan berinovasi dan memanfaatkan sumber daya yang ada merupakan kunci utama dalam membangun infrastruktur pendidikan. Program Dana BOS sendiri merupakan inisiatif pemerintah pusat yang ditujukan kepada lembaga pendidikan yang melaksanakan program wajib belajar (Womsiwor, 2020, dalam Gita, 2020). Sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 76 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013, khususnya pada bagian D yang membahas tentang Sasaran Program dan Besaran Bantuan, alokasi dana BOS di seluruh provinsi di Indonesia dihitung berdasarkan jumlah siswa yang terdaftar (Rizky

Rinaldi, hlm. 149). Pengelolaan dana ini sendiri telah dilaksanakan sejak Juli 2005 (Kadek Gita, hlm. 341). Setiap sekolah, baik negeri maupun swasta, menerima dana BOS untuk SMP sebesar Rp710.000 per siswa per tahun, yang jika dihitung per bulan, setara dengan sekitar Rp59.166 per siswa (Inkiriwang, 2020).

Sementara itu, harapan utama dari Ibu Yuliyanti adalah agar fasilitas dapat ditingkatkan menjadi lebih modern dan sesuai dengan perkembangan zaman. Pernyataan ini terlihat dalam ungkapan,

“Sarannya lebih canggih lagi selalu mengikuti perkembangan zaman aja” (wawancara dengan guru kurikulum, Ibu Yuliyanti, pada tanggal 26 Agustus 2025).

Secara keseluruhan, hasil wawancara ini mengungkapkan bahwa MTs Al Fatimiyah masih perlu lebih aktif dalam menyediakan akses inklusif bagi siswa penyandang disabilitas, aksesibilitas seperti jalur landai dan toilet difabel belum tersedia dengan optimal, padahal hal ini penting untuk mewujudkan pendidikan inklusif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Meskipun mereka sudah cukup mahir mengatasi keterbatasan melalui pengelolaan dana BOS dan bantuan eksternal. Harapan untuk menghadirkan fasilitas modern di sekolah tersebut sangat selaras dengan kebutuhan pendidikan di era digital ini, di mana lembaga pendidikan dituntut untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran. Penelitian terbaru bahkan menegaskan bahwa digitalisasi fasilitas, misalnya dengan menyediakan perangkat multimedia, koneksi internet, dan platform pembelajaran berbasis teknologi, dapat secara signifikan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesesuaiannya dengan tuntutan abad ke-21 (Prasetyo, 2024). Oleh karena itu, sangat penting bagi sekolah ini untuk mengembangkan rencana jangka panjang yang menekankan aspek inklusi dan digitalisasi.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar fasilitas di MTs Al Fathimiyah secara umum sudah cukup baik dan mendukung proses belajar dengan efektif. Institusi telah menyediakan sarana yang lengkap

dan layak, termasuk kelas, laboratorium, perpustakaan, teknologi pembelajaran digital seperti proyektor dan smart TV, serta pengelolaan yang kreatif untuk mengatasi masalah seperti penyediaan buku paket. Hal ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memperkuat efektivitas pembelajaran. Namun, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, terutama mengenai kurangnya fasilitas yang ramah bagi siswa dengan kebutuhan khusus dalam kerangka pendidikan inklusif. Dari hasil penelitian ini muncul implikasi yang menekankan pentingnya pengembangan yang berkelanjutan untuk standar fasilitas pendidikan agar tetap sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan yang semakin beragam. Sekolah harus terus berinovasi dalam penggunaan dana, membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, serta mengoptimalkan pemeliharaan sarana untuk menunjang proses pembelajaran yang efektif dan inklusif. Penelitian ini juga menyoroti perlunya dukungan dari pihak luar, baik pemerintah maupun sektor swasta, dalam meningkatkan infrastruktur pendukung seperti pasokan listrik dan koneksi internet yang memadai, yang merupakan syarat utama untuk keberhasilan pendidikan di era modern.

Keterbatasan dari penelitian ini terletak pada fokus yang hanya menjelaskan pemenuhan sarana dan prasarana, serta kurangnya analisis mengenai dampak langsung terhadap hasil belajar siswa dalam bentuk kuantitatif. Selain itu, penelitian ini juga belum menjelajahi secara mendalam mengenai aspek inklusi pendidikan untuk siswa dengan kebutuhan khusus, serta efektivitas penggunaan teknologi pembelajaran secara keseluruhan. Oleh karena itu, saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk melakukan studi yang lebih lanjut mengenai hubungan antara ketersediaan dan mutu sarana-prasarana dengan prestasi akademik siswa dalam bentuk kuantitatif, serta mengeksplorasi strategi dan penerapan pendidikan inklusif yang lebih terintegrasi. Penelitian di masa depan juga dapat memperluas fokusnya dengan menilai dampak dari penggunaan teknologi pembelajaran terhadap motivasi dan keterlibatan siswa, untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di era digital.

REFERENSI

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Fajartriani, T., & Karsiwan, W. (2021). Manajemen Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 7(1), 162–168. <https://doi.org/10.31949/educatio.v7i1.907>
- Fauzi, M. I. F. (2020). Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan. *Jurnal Al-Rabwab*, XIV(2), 90–115.
- Fitrah, A., Yantoro, Y., & Hayati, S. (2022). Strategi Guru dalam Pembelajaran Aktif Melalui Pendekatan Saintifik dalam Mewujudkan Pembelajaran Abad 21. *Jurnal Basicedu*, 6(2), 2943–2952. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i2.2511>
- Gita, K. K. S. (2020). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) di Sma Negeri 4 Singaraja Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 11 (2), 340-348., 11 (2)(2), 340–348. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/34447>
- Hakim, L., & Fikriyah, L. (2021). Pengaruh sarana dan prasarana terhadap efektivitas pembelajaran. *Jurnal Pendidikan*, 9(2).
- Inkiriwang, R. R. (2020). Kewajiban Negara Dalam Penyediaan Fasilitas Pendidikan Kepada Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Quarterly Journal of Health Psychology*, 8(2), 149–150. http://hpj.journals.pnu.ac.ir/article_6498.html
- Juita, G., Jahera, J., Zulkifli, A., & Ananda, R. (2024). Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Dalam Meningkatkan Proses Pembelajaran Yang Efektif. *Elementary School*, 11, 572–582.
- Lincoln, Y. S. (1985). *Naturalistic Inquiry*. 75.
- Megawati, & Rochman, C. (2019). Analisis Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana pada Sekolah. 12(2), 240–258.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, dan Sekolah Men.* (2007).
- Prasetyo, R. H. (2024). Transformasi Pembelajaran Digital dalam Pendidikan Modern. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 12(2).
- Rachman, A., Hayati, C., & Mariyani, I. (2022). Efektifitas Good School Governance Melalui Pengelolaan Dana BOS (Studi Empiris: SMP/Mts di Banyuwangi). *Journal of Management*, 5(3), 97–111.
- Rahayu, A. (2024). Tata Ruang Ramah Difabel dalam Mewujudkan Sekolah Inklusi. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan*, 3(1).
- Ridder, H. G. (2014). *Qualitative Data Analysis. A Methods Sourcebook 3 rd*

Edition.

- Sari, D. P., & Asmarani, R. (2023). Strategi sekolah dalam menghadapi keterbatasan sarana pembelajaran. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1).
- Susanto, A. (2022). Pemanfaatan teknologi pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 14(1).
- Sutisna, N. W., & Effane, A. (2022). Fungsi Manajemen Sarana dan Prasarana. *Karimah Tauhid*, 1(2), 266–233.
- Triyono, A. (2019). *Analisis Sarana dan Prasarana dalam Meningkatkan Efektivitas Belajar*.
- Wulansari, S. (2021). Manajemen Pembiayaan Pembangunan Fasilitas Pendidikan di Sekolah Dasar. *Disertasi*, 1–461.

Sumber Wawancara

- Yuliyanti. (2025). Guru Kurikulum MTs Al-Fathimiyah. *Wawancara*. Karawang, 26 Agustus 2025.